

**OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH
DALAM KERANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2006
SKRIPSI**



Oleh:

Khadijah Khairunnisa

H0413020

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2017

**OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH
DALAM KERANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2006**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh derajat Sarjana Pertanian
di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret



Oleh:

Khadijah Khairunnisa

H0413020

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2017

**OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYULUH
DALAM KERANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2006**

Yang diajukan dan disusun oleh :

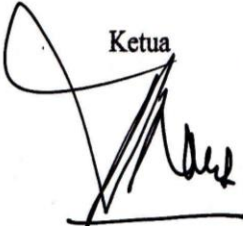


Khadijah Khairunnisa

H0413020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal : 19 Mei 2017

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua	Susunan Dewan Penguji Anggota I	Anggota II
		
<u>Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si.</u> NIP. 196812271994031002	<u>Arip Wijianto, S.P., M.Si.</u> NIP. 197712262005011002	<u>Eka Rusdiyana, S.P., M.Sc.</u> NIK. 1985101920161001

Surakarta, Mei 2017

Mengetahui,

Universitas Sebelas Maret

Fakultas Pertanian

Dekan



Prof. Dr. Bambang Pujiasmanto, M.S
NIP. 195602251986011001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Pujiasmanto, M.S. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Agung Wibowo, S.P., M.Si. selaku Ketua Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Ir. Sugihardjo, M.S. selaku Ketua Komisi Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. selaku pembimbing utama atas bimbingan dan arahan selama menyelesaikan skripsi di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Arip Wijianto, S.P., M.Si. selaku pembimbing pendamping sekaligus pembimbing akademik atas bimbingan dan arahnya selama kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Eksa Rusdiyana, S.P., M.Sc. selaku Penguji Tamu atas masukan dan saran yang membangun.
7. Ir. Jazairi, MM. dan Ir. Wahyu Prasetya, MM. selaku penanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten atas izin yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Ali, SP. Dan Pariman, SP. selaku penyuluh pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten atas bantuan yang diberikan selama penelitian.

9. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya untuk kehidupan saya dan mohon maaf atas semua kesalahan yang telah saya lakukan.
10. Saudara saya Mbak Dewi, Mas Agri dan Mas Khalid yang senantiasa mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat saya Dian, Dite, Rika, Dela, Sindi, Yuli, Akmal, Garinda, Dicky dan Dony yang selalu membantu saya dalam masa kuliah.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang mendukung dari semua pihak untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta, Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
<i>SUMMARY</i>.....	xv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
II. LANDASAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Penyuluhan Pertanian	13
2. Penyuluh Pertanian	14
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pertanian	16
4. Kinerja Penyuluh Pertanian	17
5. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian	19
6. Pengertian dan Peranan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	25
C. Kerangka Berpikir	28
D. Pembatasan Masalah.....	29
E. Dimensi Penelitian.....	30
III. METODE PENELITIAN	32
A. Metode Dasar Penelitian.....	32
B. Metode Pengumpulan Data	33

C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Validitas Data	37
F. Metode Analisis Data	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Kabupaten Sragen	47
2. Kabupaten Klaten.....	48
B. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	49
1. Kabupaten Sragen	51
2. Kabupaten Klaten.....	55
C. Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	57
1. Kabupaten Sragen	58
2. Kabupaten Klaten.....	59
D. Sistem Tata Kerja Penyuluhan	61
1. Kabupaten Sragen	61
2. Kabupaten Klaten.....	61
E. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	62
1. Program Penyuluhan	62
2. Mekanisme Kerja dan Metode	64
3. Materi Penyuluhan	65
F. Dampak Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	65
1. Perubahan Perilaku.....	65
2. Peningkatan Produksi dan Pendapatan.....	66
G. Kinerja Penyuluh Pertanian	66
1. Persiapan Penyuluhan Pertanian	69
2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	70
3. Evaluasi dan Pelaporan	70
4. Pengembangan Profesi	71
5. Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian	72
H. Analisis SWOT.....	73

1. Analisis Evaluasi Faktor Internal/Eksternal.....	73
2. Analisis Matriks SWOT.....	77
3. Tahap Keputusan Strategi.....	81
V.KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu yang Terkait.....	12
Tabel 3. Jumlah Informan Terpilih	34
Tabel 4. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	37
Tabel 5. Analisis Faktor Internal.....	41
Tabel 6. Analisis Faktor Eksternal	43
Tabel 7. Analisis SWOT	44
Tabel 8. Analisis QSPM.....	46
Tabel 9. Keragaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Dua Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016	50
Tabel 10. Ketenagaan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten	58
Tabel 11. Tenaga Penyuluh Kabupaten Sragen berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016.....	59
Tabel 12. Tenaga Penyuluh Kabupaten Klaten berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016.....	60
Tabel 13. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2016 Komoditas Padi.....	73
Tabel 14. Analisis Evaluasi Faktor Internal Pengoptimalan Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh.....	74
Tabel 15. Analisis Evaluasi Faktor Eksternal Pengoptimalan Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh.....	76
Tabel 16. Matriks SWOT berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal.....	78
Tabel 17. Analisis QSPM.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir Mengenai Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Dalam Kerangka Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2006	29
Gambar 2. Model Analisa Interaktif	40
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan.....	54
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Pertanian	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian	92
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	93
Lampiran 3. Kuesioner Narasumber	104
Lampiran 4. Transkrip Wawancara	106
Lampiran 5. Rekapitulasi	109
Lampiran 6. Dokumentasi.....	111
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian.....	112

RINGKASAN

Khadijah Khairunnisa. H0413020. 2017. **“Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh dalam Kerangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006”**. Dibimbing oleh Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. dan Arip Wijianto, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Berbagai upaya pembaharuan telah dilakukan menuju terciptanya sistem penyuluhan pertanian yang profesional, dinamis dan efisien, yang diarahkan pada pengembangan profesionalisme penyuluh sebagai profesi yang mandiri, perwujudan jati diri penyuluh sebagai pendidik, dan mitra kerja petani. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung hal tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU-SP3K) yang mengamatkan pembentukan kelembagaan penyuluh pertanian mulai tingkat pusat sampai ke daerah, namun di Provinsi Jawa Tengah tidak semua kabupaten/ kota yang ada membentuk kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keragaan tugas pokok dan fungsi penyuluh pada kelembagaan yang sudah melaksanakan dan belum melaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, menganalisis keragaan aspek pelaksanaan keragaan tugas pokok dan fungsi penyuluh pada kelembagaan yang sudah melaksanakan dan belum melaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat penyuluh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan merumuskan strategi untuk pengoptimalan tugas pokok dan fungsi penyuluh.

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini secara purposive mengambil studi kasus di Badan Pelaksana Penyuluhan (BAPELUH) Kabupaten Sragen dan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sragen sudah membentuk BAPELUH dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Kabupaten Klaten yang belum membentuk kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, namun membentuk kelembagaan penyuluhan dengan Peraturan Bupati. Sumber data pada penelitian ini adalah informan dan dokumen atau arsip. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian hasil pengamatan tersebut dilakukan reduksi. Teknik analisis data ini menggunakan model analisis data interaktif yang terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan dengan verifikasi dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tugas pokok penyuluh pada kelembagaan yang sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yaitu melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi bidang program penyuluhan dan perencanaan, evaluasi pelaporan, bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, bidang informasi dan teknologi, sedangkan fungsi penyuluh pada kelembagaan yang sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yaitu: (a) merumuskan kebijakan teknis bidang program penyuluhan dan

perencanaan, evaluasi pelaporan, bidang kelembagaan dan sumber daya manusia, bidang informasi dan teknologi, (b) melaksanakan pelayanan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, (c) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, (d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tugas pokok kelembagaan yang belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, sedangkan fungsinya yaitu: (a) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian, (d) pemberian penyuluhan kepada petani, dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati.

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh pada kelembagaan yang sudah melaksanakan maupun belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah sama, yaitu dari proses persiapan penyuluhan hingga proses evaluasi dan pelaporan. Tidak ada perbedaan pada dua kelembagaan tersebut dalam melakukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengoptimalan tugas pokok dan fungsi penyuluh adalah sebagai berikut: (a) Faktor-faktor internal yang menjadi pendukung adalah PERDA kelembagaan penyuluhan, lembaga peneliti dan pelatihan pertanian, penghargaan terhadap penyuluh berprestasi, insentif yang memadai bagi penyuluh dan tersedianya sarana komunikasi bagi penyuluh dan stakeholder. (b) Faktor-faktor internal yang menjadi penghambat adalah koordinasi antar subsektor lemah, kuantitas dan kualitas PPL terbatas, sarana dan prasarana PPL terbatas, anggaran APBD terbatas dan perbedaan persepsi keberadaan kelembagaan penyuluhan. (c) Faktor-faktor eksternal yang menjadi pendukung adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan, PP No. 41 Tahun 2007 tentang SOTK daerah, Permenpan No. PER/02/MENPAN/2/2008 tentang jabatan fungsional PPL dan kompetensi serta profesionalisme, penghargaan terhadap penyuluh berprestasi di tingkat nasional dan tersedianya sarana komunikasi bagi penyuluh dan stakeholder tingkat nasional. (d) Faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah alih fungsi profesi, inkonsistensi peraturan/perundangan, tumpang tindih program instansi terkait dan rendahnya minat masyarakat terhadap sektor pertanian.

(4) Strategi dalam pengoptimalan tugas pokok dan fungsi penyuluh adalah membentuk badan sendiri yang spesifik menaungi penyuluhan pertanian agar tercipta sistem penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani. Saran yang diberikan penulis adalah: (a) dalam pengaturan kelembagaan, pemerintah semestinya memberikan *reward* atau *punishment* bagi daerah yang melaksanakan Undang-Undang, sebagai contoh Kabupaten Sragen yang merespon adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebaiknya diberi *reward* sedangkan Kabupaten Klaten yang tidak merespon diberi *punishment*; (b) Penyatuan penyuluh pada satu lembaga yang dapat mengakomodasi kepentingan penyuluh pertanian dan petani agar tetap dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; (c) Untuk mendukung peranan dan tanggung jawab penyuluh pertanian terhadap tugas dan tanggungjawabnya,

kelembagaan yang ada saat ini diharapkan membuat program unggulan disertai target tertentu sesuai kondisi wilayah maka penyuluh pertanian akan mempunyai kegiatan yang lebih terarah dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap pekerjaannya; (d) Kebijakan pemerintah dalam menetapkan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian harus mampu mencerminkan kerjasama petani, penyuluh dan peneliti dalam merancang usahatani yang responsif terhadap kemampuan wilayah.

SUMMARY

Khadijah Khairunnisa. H0413020. 2017. "Optimization of the Duties and Functions of Extension within the Framework of the Implementation of Law Number 16 of 2006". Guided by Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. And Arip Wijianto, S.P., M.Si. Faculty of Agriculture Sebelas Maret University of Surakarta.

Various renewal efforts have been made towards the creation of professional, dynamic and efficient agricultural extension systems aimed at developing professionalism of extension agents as independent professions, the realization of the identity of extensionists as educators, and peasant partners. One of the government's efforts to support it, Law Number 16 of 2006 on Agricultural, Fishery and Forestry Extension System (UU-SP3K) has been established to save the establishment of agricultural extension institute from the central level to the regions, but in Central Java Province not all the existing districts/cities form an institution as mandated in the law. This study aims to analyze the performance of the main tasks and functions of extension workers in institutions that have implemented and have not implemented according to Law Number 16 of 2006, analyzing the aspects of the implementation of the performance of the main tasks and function of extension on institutions that have implemented and have not implemented according to the Law Number 16 of 2006, to know the factors that support and hinder the extension agent in carrying out the main tasks and functions and formulate strategies for optimizing the main tasks and function of extension workers.

The basic method used in this research is descriptive qualitative method. The location of this research is purposive to take case study in Extension Executing Agency (BAPELUH) of Sragen Regency and Agricultural Service of Klaten Regency with the consideration that Sragen Regency has formed BAPELUH with Local Regulation in accordance with Law Number 16 of 2006 and Klaten Regency that has not established institutional With Law Number 16 of 2006, but established institutional counseling with the Regent's Regulation. Sources of data in this study are informants and documents or archives. The researchers collected data using interview technique, observation and documentation then the observation result was done reduction. This data analysis technique using interactive data analysis model consisting of 3 main components that is data reduction, data presentation and drawing conclusion with verification and SWOT analysis to formulate strategy.

The results of the research indicate that: (1) The main tasks of extension workers in institutions that are in accordance with Law Number 16 of 2006 is to implement some government tasks in the field of agricultural extension, fishery and forestry covering the field of extension and planning program, reporting evaluation, institutional and Human resources, information and technology field, while the extension function of institutions that are in accordance with Law Number 16 of 2006 are: (a) formulating technical policy in the field of extension program and planning, reporting evaluation, institutional and human resources, Information and technology, (b) carry out the services of extension of agriculture,

fisheries and forestry, (c) coordinate with relevant agencies in the framework of developing agricultural extension programs, fisheries and forestry, (d) carrying out other tasks assigned by the bupati in accordance with duties and Fun Gsinya. While the main tasks and functions of institutions that are not in accordance with Law Number 16 of 2006 is implement some government tasks in the field of agriculture, and the functions are: (a) formulation of technical policy in agriculture, (b) administration of government affairs and public services in agriculture, (c) development and execution of tasks Agriculture, (d) extension services to farmers, and (e) the execution of other duties assigned by the major.

(2) Implementation of the main duty and function of extension on institution that has been in accordance with and not yet in accordance with Law Number 16 of 2006 is the same, that is from extension preparation process until evaluation and reporting process. There is no difference in the two institutions in performing their main duties and functions.

(3) Internal and external factors that support and obstruct the optimization of the main tasks and function of extension workers are as follows: (a) Internal factors that support is PERDA institutional extension, research institutes and agricultural training, awards to extension of achievers, Adequate incentives for extension workers and the availability of communication facilities for extension workers and stakeholders. (b) Internal factors that become obstacles are weak inter-subsector coordination, quantity and quality of limited PPL, limited PPL facilities and infrastructure, limited APBD budget and difference of perception of extension institutional existence. (c) Internal factors that support is Law Number 16 of 2006 regarding extension system, PP. 41 of 2007 concerning regional SOTK, Permenpan number PER/02/MENPAN/2/2008 concerning functional position of PPL and competence and professionalism, awards to extension of achievement at national level and availability of communication facilities for extension agents and stakeholders at national level. (d) External factors that are inhibiting are the transfer of professional functions, inconsistencies of regulation/law, overlapping programs of related institutions and low public interest in the agricultural sector.

(4) The strategy in optimizing the main tasks and extension function is to establish its own specific body to oversee agricultural extension in order to create an agricultural extension system in accordance with the needs of farmers. The suggestions given by the author are: (a) in institutional arrangement, the government should give reward or punishment for the region implementing the Act, for example Sragen regency that responds to the Law Number 16 of 2006 should be rewarded while Klaten regency is not responding given punishment; (b) Unification of extension agents at one institution that can accommodate the interests of extension farmers and farmers to remain implemented as a form of implementation of Law Number 16 of 2006; (c) To support the role and responsibilities of agricultural extension workers on their duties and responsibilities, the existing institutions are now expected to create a flagship program accompanied by specific targets according to the conditions of the area then the agricultural extension agent will have more focused activities and have a more sense of responsibility towards the worker; (d) The government policy in establishing the institutional structure of agricultural extension should be able to

reflect the cooperation of farmers, extension workers and researchers in designing farms that are responsive to the capability of the region.